



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NIDAUH HASANAH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
3. NHK : 930685

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 680.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m2/118 m2 di KAB / KOTA KOTA
SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 94 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 124.000.000

1. MOBIL, HONDA DD4 1,5 S MT CKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO NC11B3CA/T Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 28.473.125

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 837.673.125

III. HUTANG Rp. 43.116.391

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 794.556.734

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.